



PROPOSAL PERAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kualitas suatu bangsa dapat ditentukan dari kualitas pendidikan sumber daya manusianya. Jika kualitas pendidikan yang diberikannya baik kepada sumber daya manusia, maka suatu bangsa tersebut akan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, jika kualitas pendidikan yang diberikan kepada sumber daya manusianya ternyata kurang baik maka kualitas bangsa tersebut juga akan kurang baik.

Pendidikan bermutu merupakan investasi masa depan bangsa dalam membentuk warga negara seutuhnya yang terdidik, cerdas, dan merupakan asset yang menentukan eksistensi serta kemajuan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan. Proses pengembangan manusia yang terdidik dan cerdas memerlukan pendidik yang mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui olah qolbu, olah cipta/fikir, olah karsa, olah karya, olah rasa, dan olah raga (pendidik professional).

Menurut UU No. 20 tahun 2003 dan PP No. 73 tahun 1991, pendidikan nasional diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Pendidikan sekolah atau disebut pendidikan formal menurut Coombs (1968) merupakan sistem pendidikan yang berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar sampai dengan universitas atau pendidikan tinggi yang setaraf, termasuk kegiatan belajar yang berorientasi akademik, umum, dan juga mencakup keterampilan, serta bermacam-macam spesialisasi dan latihan secara professional.

Pendidikan luar sekolah dalam hal ini diistilahkan sebagai pendidikan informal, dan nonformal. Dijelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan di jalur nonformal dan informal (Ishak, 2012: 17)

Kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusia baik yang diakibatkan oleh lingkungan maupun alam yang kurang bersahabat, sering memaksa manusia untuk mencari cara yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kesulitan yang dialaminya. Masih banyaknya warga yang tidak melanjutkan pendidikan ke taraf yang lebih baik sehingga memungkinkan mereka menggeluti profesi tertentu, menuntut upaya-upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Ayat 11-13, diterangkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Terkait hubungannya dengan fenomena putus sekolah, Budi Trikorayanto selaku Sekjen Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asahpena) berpendapat perlu adanya upaya melalui jalur pendidikan nonformal untuk memfasilitasinya (Rahmawati, 2018). Suprijanto (Masno, 2015) menyatakan bahwa pendidikan nonformal dilakukan di luar pendidikan formal dan memiliki heterogen dalam sasaran pendidikan dimulai dari anak-anak sampai lanjut usia (lansia). Pendidikan nonformal memiliki berbagai macam lembaga, seperti BPKB (Badan Penyelenggara Kegiatan Belajar) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang tersebar di Kabupaten. Pada penyebaran tingkat Kecamatan dan Desa, lembaga nonformal memiliki lembaga seperti LPK (Lembaga Pelatihan Khusus) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Pendidikan luar sekolah atau nonformal berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada. Dalam hubungan ini pendidikan nonformal yang berbasis kepentingan masyarakat lainnya, perlu mencermati hal tersebut, agar keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya pembangunan di masyarakatnya. Ini berarti bahwa pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber atau rujukan dalam penyelenggaraan program pendidikannya.

Hasil kajian Tim reformasi pendidikan dalam konteks Otonomi daerah (Fasli Jalal, Dedi Supriadi. 2001) dapat disimpulkan bahwa apabila pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) ingin melayani, dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus berani meniru apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat dan kemudian diperkaya dengan sentuhan-sentuhan yang sistematis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah dalam membantu menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh jalur formal/sekolah.

Bagi masyarakat yang tidak mampu, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup hari ini, karena itu mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak mau belajar hanya untuk belajar, untuk itu masyarakat perlu didorong untuk mengembangkannya melalui pendidikan nonformal berbasis masyarakat, yakni pendidikan nonformal dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat

Kemerdekaan Indonesia yang telah berusia 73 tahun ternyata belum sepenuhnya memberikan kemerdekaan di segala bidang khususnya dalam bidang pendidikan. Data UNICEF pada tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, yakni sebanyak 600

ribu anak usia Sekolah Dasar dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Rahmawati, 2018).

Lebih rinci lagi data Kementrian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia melalui statistik data merilis jumlah anak putus sekolah pada tahun 2017/2018 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2.134 siswa tingkat Sekolah Dasar, 1.855 siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama, 1.599 siswa tingkat Sekolah Menengah Atas, serta 1.744 siswa tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. (<http://statistik.data.kemdikbud.go.id>) Faktor-faktor penyebab putus sekolah di setiap daerah bervariasi, antara lain yaitu kemiskinan penduduk, kesulitan menuju sekolah, kurangnya layanan pendidikan, rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta faktor sosial budaya. Fenomena putus sekolah tersebut terjadi pada jenis pendidikan formal yang mayoritas diketahui masyarakat sebagai sekolah. Masyarakat masih menganggap sekolah sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh pendidikan, di sisi lain pemerintah mengatur pendidikan di Indonesia menjadi tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu 6,77 tahun pada tahun 2013, yang artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Ogan Komering tingkat pendidikannya hanya sampai SMP (bahkan tingkat SMP pun tidak selesai). Disamping itu permasalahan pendidikan lainnya yaitu banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki

dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah cukup memadai, tetapi di beberapa kecamatan masih terkendala dengan sulitnya aksesibilitas menuju fasilitas ini, ada beberapa sekolah dalam tahap pembangunan dengan sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku-buku diperpustakaan tidak lengkap sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai.

Upaya menciptakan Sumber Daya Manusia Ogan Komering Ilir yang cerdas terkendala pada biaya pendidikan semakin tinggi khususnya untuk pendidikan menengah ke atas. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengoptimalkan pemerataan bantuan pendidikan. Hal lain yang perlu juga ditingkatkan adalah kualitas tenaga pengajar agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kondisi sekarang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tenaga pengajar yang berkualitas tidak tersebar secara merata di sekolah-sekolah baik itu SD, SMP maupun SMA di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini menimbulkan fenomena favoritisme sekolah yang berakibat pada distribusi siswa yang tidak merata antar sekolah.

Permasalahan lainnya adalah penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas melalui pembentukan karakter dan penguasaan ketrampilan belum optimal. Pendidikan moralitas, budi pekerti dan pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membangun karakter siswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan serta moralitas siswa. Sedangkan pendidikan keterampilan memberikan bekal bagi lulusan untuk bersaing dalam tataran nasional dan global melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal.

Bersumber dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan kajian tentang bagaimana memberdayakan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang akan dilakukan melalui peran Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal. Oleh karena itu kajian ini mengambil judul Peran Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dalam Memberdayakan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, diharapkan peran Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal dapat memberikan suatu solusi untuk pemberdayaan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meskipun demikian dalam rangka penerapan kebijakan terkait terdapat masalah yang harus dipecahkan. Adapun masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pendidikan nonformal bagi pemberdayaan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Bagaimana peran Pendidikan informal bagi pemberdayaan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengelola pendidikan nonformal dan informal untuk memberdayakan masyarakatnya ?

C. TUJUAN

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Mengetahui peran Pendidikan nonformal dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Mengetahui peran Pendidikan informal dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengelola pendidikan nonformal dan informal untuk memberdayakan masyarakatnya.

D. KELUARAN/OUTPUT

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan kajian, maka keluaran yang diharapkan dari kajian Peran Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dalam Memberdayakan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sebagai berikut:

1. Terinformasikannya kondisi peran Pendidikan nonformal dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Terinformasikannya kondisi peran Pendidikan informal dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Tersusunnya model kebijakan pemerintah dalam mengelola pendidikan nonformal dan informal untuk memberdayakan masyarakatnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pendidikan menurut beberapa pakar diantaranya dinyatakan oleh John Dewey, bahwa Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama manusia. Sedangkan M.J. Longeveled mengatakan bahwa Pendidikan adalah usaha , pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Sedangkan Ki Hajar Dewantara menguraikan bahwa Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dan Ahmad D. Marimba menguraikan bahwa Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) membedakan pendidikan menjadi tiga pusat pendidikan yaitu: pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Tiga pusat pendidikan rumusan Ki Hajar Dewantara tersebut tampaknya diganti dengan istilah lain yaitu jalur pendidikan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: Ayat 1, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ayat 2, pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/ atau melalui jarak jauh.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran yang banyak terdapat di Masjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua Gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Alasan pemerintah mengagas pendidikan informal adalah:

- a. Pendidikan dimulai dari keluarga
- b. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga
- c. Homeschooling: pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal.
- d. Anak harus dididik dari lahir

Pengertian pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga

maupun lingkungannya. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan. Hasil pendidikan informal mendapat pengakuan sama seperti halnya pendidikan formal dan pendidikan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan dari pemerintah.

Mengacu pada pengertian pendidikan informal di atas, fungsi dan peranan utama pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Adapun beberapa fungsi dan peranannya adalah sebagai berikut;

- Membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun nonformal.
- Mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat belajar.
- Membantu pertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari dalam keluarga maupun lingkungan.
- Membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak.
- Memotivasi anak agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya.
- Membantu anak didik agar lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.

Dari penjelasan di atas, kita menyadari bahwa peran keluarga, khususnya orang tua, sangat besar terhadap pertumbuhan seorang anak. Artinya, orang tua akan selalu terlibat dalam proses pembelajaran seorang anak sepanjang hidupnya.

Berikut adalah fungsi dan peranan orang tua dalam proses belajar yang efektif dan bermakna;

- Orang tua sebagai pendidik
- orang tua sebagai pembimbing
- Orang tua sebagai teladan
- Orang tua sebagai pengontrol

- Orang tua sebagai fasilitator
- Orang tua sebagai motivator
- Orang tua sebagai inovator

Suatu jalur pendidikan dapat kita kenali dengan memperhatikan karakteristiknya. Adapun ciri-ciri pendidikan informal adalah sebagai berikut;

- Tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi.
- Peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu.
- Proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan.
- Tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan.
- Tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya.
- Proses pendidikan dilakukan secara terus menerus tanpa mengenal ruang dan waktu
- Orang tua merupakan guru bagi anak didik.
- Tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran.

Seperti yang disebutkan pada penjelasan di atas, bahwa proses penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan.

Adapun beberapa contoh jalur pendidikan ini adalah sebagai berikut;

- Pendidikan budi pekerti
- Pendidikan agama
- Pendidikan etika
- Pendidikan sopan santun
- Pendidikan moral
- Sosialisasi dengan lingkungan

Pendidikan Formal	Pendidikan Nonformal	Pendidikan Informal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat pembelajaran di gedung sekolah. ▪ Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik. ▪ Kurikulumnya jelas. ▪ Materi pembelajaran bersifat akademis. ▪ Proses pendidikannya memakan waktu yang lama ▪ Ada ujian formal ▪ Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta. ▪ Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu. • Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat pembelajarannya bisa di luar gedung ▪ Kadang tidak ada persyaratan khusus. ▪ Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. ▪ Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. ▪ Bersifat praktis dan khusus. ▪ Pendidikannya berlangsung singkat ▪ Terkadang ada ujian • apat dilakukan oleh pemerintah atau swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat pembelajaran bisa di mana saja. ▪ Tidak ada persyaratan ▪ Tidak berjenjang ▪ Tidak ada program yang direncanakan secara formal ▪ Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. ▪ Tidak ada ujian. ▪ Tidak ada lembaga sebagai penyelenggara.

Istilah pemberdayaan masyarakat atau empowerment merupakan istilah yang diangkat dari hasil penelitian seorang sarjana pendidikan nonformal Suzanne Kindervatter dalam bukunya *Nonformal as An Empowering process*, memiliki makna agar orang-orang yang diberdayakan itu mempunyai “daya” atau mempunyai kemampuan untuk hidup layak sama dengan temannya sesama manusia. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat seimbang baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, antara hak dan kewajiban, menjadi warga negara yang bersikap dan berbuat demokratis terhadap sesama manusia menuju masyarakat yang

memahami akan hak, kewenangan dan tanggungjawab mereka dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Chambers (dalam Kartasasmita, 1996: 142) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social yakni bersifat people-centered, participatory, empowering and sustainable. Pengertian lain yang disampaikan oleh Tjokrowinoto (dalam Kusnadi, 2006: 219) konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (basic need) akan tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety need). Sumodingrat (1996: 185) menyatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki ketrampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.

Proses pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonomi dan kemampuan politiknya yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki kedudukannya dimasyarakat, dengan kata lain proses pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran/pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan/atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang berdaya.

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat madani (civil society), yakni suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari akan hak-hak dan

kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya (Tila'ar, 1997: 231).

Kebijakan merupakan bentuk upaya manusia untuk mengetahui dan menyelesaikan persoalan (problem) yang bersifat umum. Ada banyak persoalan atau ketidakpuasan dalam masyarakat, akan tetapi tidak semua persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai problem umum.

Charles O. Jones dalam Dunn (1981: 44) mengemukakan bahwa, “*a policy problem is an unrealized value, need or opportunity which, however identified, maybe attained through public action*”. Suatu kebijakan dapat terealisasi apabila kebijakan itu dibutuhkan oleh masyarakat, artinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak atau kepentingan publik karena kebijakan muncul didahului oleh tindakan-tindakan publik.

Mengenai implementasi kebijakan publik, Shafritz dan Russel (2005:55) mengemukakan: “*Implementation is the process of putting a government program into effect; it is the total process of translating a legal mandate, whether an executive order or an enacted statute, into appropriate program directives and structure that provide services or create goods.*” Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa implementasi adalah proses menjalankan program pemerintah, keseluruhan proses yang menerjemahkan suatu perintah yang sah, baik perintah eksekutif maupun ketetapan undang-undang kedalam arahan program dan struktur yang sesuai yang menyediakan jasa ataupun menciptakan barang-barang. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan bagian dari tugas administrasi negara dan identik dengan proses politik. Pernyataan ini didasarkan pada pemikiran bahwa administrasi negara memiliki mandat untuk melaksanakan tugas-tugas negara, dengan menyusun berbagai program dan mengelola kepentingan publik.

Hal ini berarti bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang yang bersangkutan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan kajian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu mencari, menganalisis dan memberikan solusi untuk masalah yang ada secara aktual. Dengan cara mencari dan mengumpulkan data di lapangan secara langsung, lalu mengklasifikasi, menganalisis, kemudian menginterpretasikan menjadi suatu hasil data.

Adapun data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini penulis mengklarifikasi data menjadi dua golongan, yaitu;

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung di lapangan.

2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dengan memanfaatkan data-data arsip dan dokumen dari instansi terkait seperti data dari Kantor Kepala Desa Karanggupito.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah sebagai berikut.

1) Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung objek dilapangan. Data yang diamati meliputi keberadaan objek, aktivitas masyarakat setempat dan stakeholder yang berhubungan.

2) Wawancara Langsung

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara penulis dengan narasumber.

3) Pengkajian Data Kepustakaan

Adalah teknik pengumpulan data berdasarkan bukti-bukti tertulis yang berasal dari buku, artikel, dan brosur atau bahan tertulis lainnya yang tersusun secara ilmiah.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau mendiskripsikan suatu keadaan secara objektif. Sementara itu untuk bentuk konsep kebijakan peran Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan menggunakan hasil data observasi yang disesuaikan dengan teori – teori tentang kebijakan, pemberdayaan masyarakat, Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal yang sudah ada.

G. WAKTU DAN TEMPAT

Lokasi kajian sendiri dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dilakukan selama tiga bulan, yaitu dimulai awal bulan Februari 2019 sampai dengan akhir bulan April 2019.